



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - e. Laporan operasional;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	2.640.255.197.404,59
b. Belanja + Transfer	Rp.	2.625.127.073.243,89
Surplus	Rp.	15.128.124.160,70
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	30.399.429.018,77
- Pengeluaran	Rp.	16.175.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	14.224.429.018,77
SILPA	Rp.	29.352.553.179,47

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 208.970.486.576,64 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.849.225.683.981,23
b. Realisasi	Rp.	2.640.255.197.404,59
Selisih kurang	Rp.	(208.970.486.576,64)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.238.309.690.756,11 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	2.863.436.764.000,00
b. Realisasi	Rp.	2.625.127.073.243,89
Selisih kurang	Rp.	(238.309.690.756,11)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.29.339.204.179,47 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp.	(14.211.080.018,77)
b. Realisasi	Rp.	15.128.124.160,70
Selisih lebih	Rp.	29.339.204.179,47

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 13.349.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah	Rp.	30.386.080.018,77
b. Realisasi	Rp.	30.399.429.018,77
Selisih lebih	Rp.	13.349.000,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah	Rp.	16.175.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	16.175.000.000,00
Selisih	Rp.	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 13.349.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	14.211.080.018,77
b. Realisasi	Rp.	14.224.429.018,77
Selisih lebih	Rp.	13.349.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	7.564.834.177.844,69
b. Jumlah kewajiban	Rp.	200.487.233.346,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	7.364.346.944.498,69

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016	Rp.	30.411.880.468,77
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	584.253.486.969,24
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(585.300.362.808,54)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	2.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	(14.349.220,00)
f. Saldo kas akhir di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2016	Rp.	<u>29.352.655.409,47</u>
g. Kas di Bendahara RSUD Bayung Lincir	Rp.	283.899.231,00
h. Kas di Bendahara RSUD Sungai Lilin	Rp.	167.749.358,00
i. Kas di Bendahara Puskesmas	Rp.	<u>19.076.885,00</u>
j. Saldo Akhir Kas	Rp.	<u>29.823.380.883,47</u>

Pasal 6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	30.397.429.018,77
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	30.397.429.018,77
Selisih	Rp.	<u>0,00</u>
c. SILPA	Rp.	29.352.553.179,47
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	<u>29.352.553.179,47</u>

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	3.237.549.686.811,94
b. Beban	Rp.	2.317.252.983.814,58
c. Surplus dari kegiatan operasional	Rp.	920.296.702.997,36
d. Defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	(1.216.750.831,02)
e. Surplus laporan operasional	Rp.	919.079.952.166,34

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	6.624.812.219.386,32
b. Surplus LO	Rp.	919.079.952.166,34
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	(179.545.227.053,97)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	7.364.346.944.498,69

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV: Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- e. Lampiran V : Laporan operasional
- f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini.
- c. Laporan keuangan APBDesa dalam Lampiran X peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR. 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 2/MUBA/2017



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 21 Agustus 2017

Nomor : 4759/II/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Nomor Register (Noreg)

Kepada
Yth. Bupati Musi Banyuasin
c.q. Sekretaris Daerah
di
Sekayu

Memenuhi ketentuan Pasal 243 ayat (1) dan Pasal 245 ayat (3) ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, yang telah selesai hasil evaluasinya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 518/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 15 Agustus 2017, diberikan Nomor Register (Noreg), sebagai berikut :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN: (2/MUBA/2017)

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

**a.n. SEKRETARIS DAERAH PROV. SUMSEL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.**

**KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
MEWAKILI,**



**H. Kopani Ardi, SH.M.Hum
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 195911011980031003**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).